

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia bermula dengan Sejak awal 1980-an, perbincangan mengenai bank syariah di Indonesia telah dimulai, dengan gagasan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, diskusi-diskusi mengenai hal ini digelar di berbagai tempat, termasuk di Bandung melalui Bait At-Tamwil Salman ITB dan di Jakarta dengan Koperasi Ridho Gusti yang masing-masing mencoba menerapkan prinsip-prinsip perbankan Islam dalam skala kecil, meskipun terbatas, eksperimen ini menjadi landasan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan), meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk kelompok kerja yang bertujuan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, langkah ini diwujudkan melalui lokakarya yang diadakan pada 18 s.d 20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, yang membahas isu bunga bank dan sistem perbankan Islam, lokakarya ini menghasilkan rekomendasi yang lebih mendalam yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada 22 s.d 25 Agustus 1990. Hasil musyawarah tersebut adalah

pembentukan Tim Perbankan MUI yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pendirian bank syariah pertama di Indonesia. (nofinawati, 2017) Hingga akhirnya terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991, dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Bank muamalat ini mampu memperlihatkan kekuatannya untuk terus bertahan pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 s.d 1998 dan langkah ini memberikan peluang bagi dunia perbankan konvensional untuk juga membuka unit usaha islam atau mengonversikan secara keseluruhan kegiatan usahanya menjadi bank Islam. Dengan demikian BMI menjadi pelopor berdirinya bank syariah dan unit usaha syariah lainnya (Ismail, 2011).

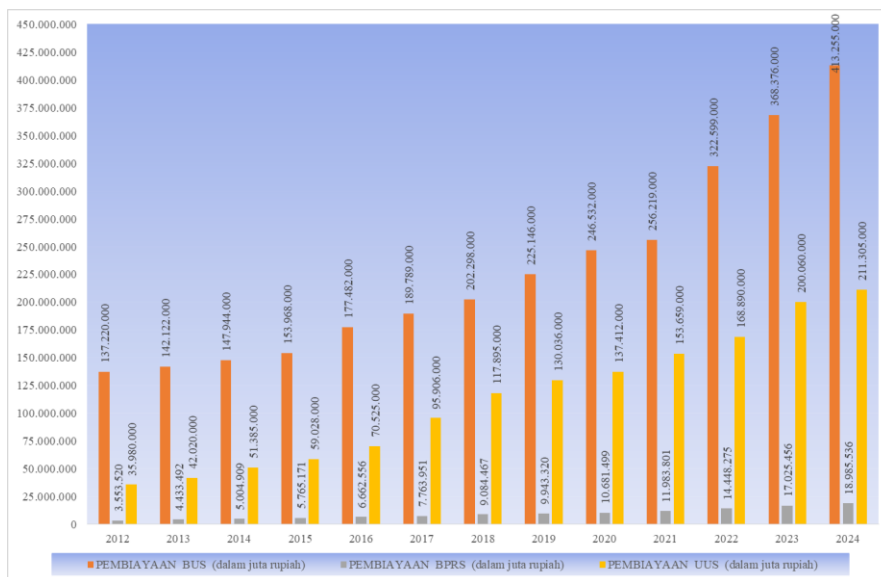
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berdasarkan prinsip Islam (Soemitra, 2009). Dalam perbankan syariah terdiri dari tiga jenis yakni Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Seiring dengan berjalannya waktu, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat dari tahun ke tahun (Arifin, 2003). Hal ini dikarenakan jumlah mayoritas penduduk indonesia beragama Islam yang merupakan modal awal bank syariah untuk melangkah maju sehingga menyebabkan perkembangan bank syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat terhadap jasa layanan syariah, serta adanya Undang-Undang tentang perbankan syariah yang

dikeluarkan membuat perbankan syariah berkembang dengan potensi yang besar (Usanti, 2015).

Bank syariah mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dengan ketentuan syariah (Soemitra, 2009). Pembiayaan ini dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Salman, 2012). Diharuskan setiap bank syariah memiliki daya saing tinggi untuk meningkatkan pembiayaannya, pengelolaan pembiayaan sangat penting mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi pihak bank itu sendiri (Alma & Priansa, 2013), serta pembiayaan yang besar mencerminkan bahwa bank tersebut mengelolanya dengan strategi yang baik serta punya kegigihan yang tinggi dalam menawarkan suatu produk dan jasa dari bank tersebut agar pembiayaan semakin meningkat, oleh karena itu bank syariah harus terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, serta pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang tepat, bank syariah tidak hanya dapat meningkatkan volume pembiayaan tetapi juga memperkuat posisinya di pasar keuangan. maka dapat dilihat fakta data perbandingan pembiayaan BUS, UUS dan BPRS tahun 2013 s.d 2023 dibawah ini.

Gambar 1. 1

Data Total Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2012 sampai dengan 2024



Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah (2012-2024)

Pada pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan pada BUS, BPRS dan UUS terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pembiayaan pada BUS pada tahun 2012 sebesar 137,2 triliun rupiah, pada tahun 2024 meningkat hingga mencapai di angka meningkat hingga mencapai di angka 413,2 triliun rupiah dan pembiayaan pada UUS tahun 2012 sebesar 35,9 triliun rupiah, pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 211,3 triliun rupiah. Sedangkan pembiayaan pada BPRS pada tahun 2012 masih di angka sebesar 3,55 triliun rupiah, di tahun 2024 mengalami peningkatan di angka 18,9 triliun rupiah. Maka dapat disimpulkan pembiayaan pada BPRS mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun angka pembiayaannya lebih kecil, sehingga dibutuhkan pengembangan bagi BPRS untuk lebih

meningkatkan lagi pembiayaannya, karena keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan oleh banyaknya pembiayaan yang disalurkan (Kasmir, 2007).

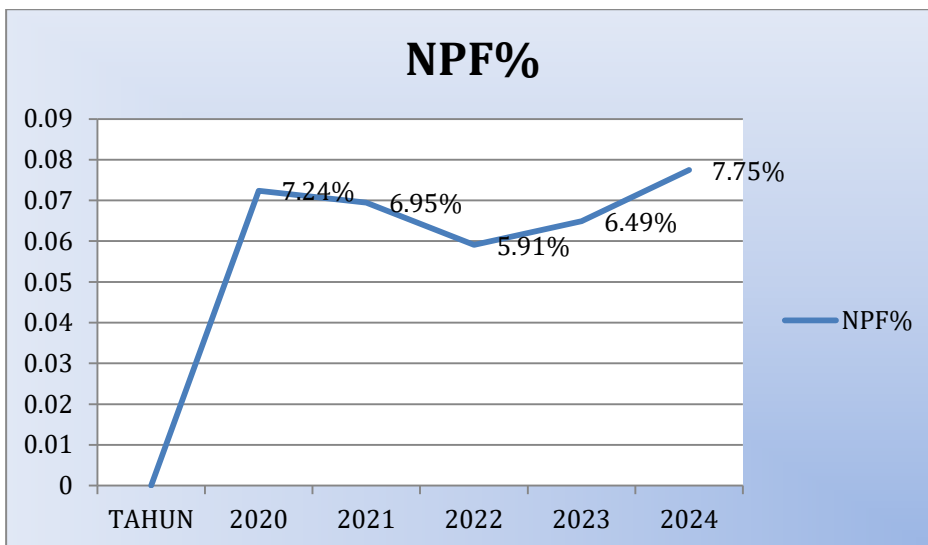
Dengan meningkatnya hasil pembiayaan BPRS, maka dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mikro dalam hal pengembangan UMKM, salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat mikro yang memiliki UMKM adalah BPRS karena potensi BPRS yang besar, sangat memungkinkan BPRS untuk lebih mengembangkan minat dan bakat masyarakat mikro (Arif, 2012). Diharapkan juga BPRS dapat menjadi lembaga yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ada banyak tantangan yang harus ditangani oleh BPRS diantaranya bersaing dalam aspek pasar dan bisnis yang ketat dalam UMKM antara BPRS dengan sesama perbankan syariah lainnya di suatu daerah mengakibatkan BPRS mengalami berbagai hambatan untuk lebih berkembang dan bisa bersaing dengan para pesaingnya yang lebih unggul dari BPRS dalam hal teknologi, jaringan serta pendanaan, serta dalam kegiatannya BPRS tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, oleh karena itu diperlukan pendalaman serta pengembangan dalam hal jaringan, teknologi, pasar, bisnis dan pendanaan BPRS, sebagai upaya penguatan BPRS (Mardhotillah, 2019). Skala usaha BPRS yang lebih kecil daripada bank umum, dan biaya dana yang mahal serta kendala-kendala lainnya mengakibatkan beberapa BPRS susah berkembang, dengan ditambahkan peraturan OJK tentang kenaikan modal minimum yang harus dimiliki untuk pendirian BPRS. Banyak BPRS yang menjadi kesulitan untuk mendirikan cabang-cabang baru karena kesulitan memperoleh modal.

Dalam menghadapi keadaan tersebut BPRS harus dapat berkompetisi dengan kompetitor lainnya (Rifa'i, 2017).

Selain itu hambatan yang harus dihadapi BPRS adalah ketika menghadapi nasabah yang lalai karena disengaja atau faktor diluar kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, yang menunjukkan bahwa terdapat risiko yang harus dihadapi BPRS, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Pemberian pembiayaan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Risiko pembiayaan merupakan bentuk paling umum dari risiko keuangan yang dihadapi oleh bank, sumber risiko bagi BPRS yang dapat dilihat dari *Non Performing Financing*. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan dimana NPF rasio antara pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pembiayaan yang bermasalah mengakibatkan kemampuan BPRS menghasilkan keuntungan semakin kecil. Dengan mengelola risiko pembiayaan secara efektif, BPRS dapat menjaga kesehatan keuangan mereka dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, nasabah juga akan merasa lebih aman dan percaya dalam menerima pembiayaan dari BPRS, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut. Secara keseluruhan, manajemen risiko pembiayaan yang baik merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan BPRS dalam menyediakan layanan pembiayaan yang aman dan terpercaya bagi

nasabahnya. Dengan demikian, BPRS dapat terus berkontribusi positif dalam pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dilihat data NPF pada BPRS tahun 2020 s.d 2024 sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Data NPF BPRS Tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2012-2024)

Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank (Bank Indonesia, 2021). Untuk itu dapat dilihat perkembangan NPF dari tahun 2020 mengalami penurunan sampai dengan 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 6,49% hingga 2024 mencapai angka 7,75%, Setelah itu NPF mengalami angka yang terus mengalami penurunan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, kemudian mengalami terjadi peningkatan kembali di tahun 2023 s.d 2024. Berdasarkan data pada tabel diatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus lebih aktif dalam mengatasi tingginya

NPF. Semakin tinggi NPF di atas 5% maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Widjiantoro, 2021).

NPF juga merupakan suatu prioritas dari perbankan, dan menjadi indikator untuk mengukur tingkat likuiditas (Taslim & Ikhwan, 2019), sehingga pengelolaan likuiditas yang baik dapat menunjang kesehatan dan kestabilan perbankan serta mengurangi risiko kebangkrutan (Irham, 2012). Risiko kebangkrutan yang terjadi ini dikarenakan tingginya NPF pada suatu bank, seperti yang terjadi pada BPRS yang menyebabkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia mengalami kebangkrutan, di karenakan pengelolaan NPF yang menyebabkan bank terlikuidasi, karena apabila NPF tidak lancar maka akan berpengaruh terhadap aset bank sehingga akan menyebabkan penurunan modal. Dan setiap meningkatnya aset atau total aset akan menyebabkan kenaikan likuiditas (Oppong, 2014).

Dengan meningkatnya aset akan sangat baik untuk keberlangsungan bank tersebut karena aset memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kegiatan operasional bank untuk menghasilkan keuntungan melalui bentuk produk bank maupun jasa-jasa yang dibutuhkan nasabah, maka aset harus diperhatikan terus menerus. Selain itu, untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat juga dari total asetnya, penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah aset bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Total aset perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan perkembangan perbankan syariah yang juga menentukan kontribusi

industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Selain itu, total aset juga menjadi tolak ukur bagi suatu bank terhadap keberhasilan kinerja setiap tahunnya, semakin besar total aset yang dimiliki suatu bank, semakin baik pula bank tersebut. Pembentukan kualitas aset BPRS berupa kualitas aset produktif dan *non*-produktif serta pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS dengan tujuan membangun BPRS yang sehat, kuat dan memiliki daya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset. Pentingnya aset membuat BPRS mesti memastikan agar aset yang dimiliki dapat dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan (Isretno, 2011).

Aset triliunan merupakan aset dengan unggulan nasional, yang diimana aset harus mencapai di angka triliun (Bank Indonesia, 2024) untuk target jangka panjang. Serta menjadi pemimpin pasar nasional. Aset triliunan merupakan pencapaian yang mencerminkan kekuatan dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian indonesia. Selain itu hal ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Aset triliunan pun menunjukkan kapasitas finansial yang besar serta menunjukkan kemampuan dalam menjaga stabilitas operasional.

Untuk membantu perusahaan memproyeksikan peramalan dibutuhkan alat analisis salah satunya adalah dengan memakai pola *trend*. Pola *trend* dapat berupa garis lurus regresi atau *trend linear* maupun bukan lurus regresi atau *trend non linear* (Yonhy, Goejantoro, & Wahyuningsih, 2013). Pola *trend* berbentuk garis berupa lengkungan atau berbentuk seperti parabola. Kelebihan dari metode ini adalah sangat baik untuk data jangka panjang dan hasil ramalan mendekati nilai aktual,

sedangkan kelemahan dari metode ini adalah tidak sesuai digunakan untuk data jangka pendek kurang dari 10 periode (Bancin & Faiz, 2016). Dalam *trend non linear* terdapat beberapa model yaitu seperti berikut: Trend eksponensial adalah sebuah *trend* yang variabel bebasnya naik secara berlipat ganda atau tidak linear. *Trend* eksponensial sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, pendapatan nasional, produksi, hasil penjualan dan kejadian kejadian lain. Selanjutnya *trend* kuadratik adalah *trend* yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun secara linear atau terjadi parabola bila datanya dibuat scatter plot hubungan variabel dependen dan independen. *Trend non linear* kuadratik disebut juga dengan *trend* parabola ini kecenderungan data yang kurvanya berpola lengkungan. Sedangkan *trend linear* adalah *trend* yang menggunakan persamaan garis lurus dan metode pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang kadang kadang dapat digambarkan dengan garis lurus atau kurva mulus, sering kali data deret waktu jika digambarkan kedalam plot mendekati garis lurus, deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam *trend linear* yang termasuk dalam *trend linear* jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus, deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam *trend linear* (Satyarini, 2007).

Sesuai penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewi Nurmala yang berjudul "Peramalan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terdaftar di OJK Menggunakan Metode *trend non linear* (Tahun Proyeksi 2023-2025)". Hasil dari peramalan kinerja keuangan yang terdiri dari ROA, CAR, dan NPF adalah diperkirakan BPRS memiliki ROA sebesar 1,97%, tahun 2024 sebesar 1,98% dan pada tahun 2025 sebesar 2,01%. Nilai MAPE menurut hasil perhitungan pun diketahui sebesar 9,028%

yang artinya model sangat baik untuk dilakukan peramalan. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dinyatakan bahwa ROA pada BPRS akan mengalami peningkatan kinerja selama beberapa tahun kedepannya. Persamaan yang didapat pada hasil peramalan CAR di BPRS yang terdaftar di OJK pada periode tahun 2023 diperkirakan BPRS memiliki CAR sebesar 27,27%, tahun 2024 sebesar 29,34% dan pada tahun 2025 sebesar 31,71%. Nilai MAPE menurut hasil perhitungan pun diketahui sebesar 6,489% yang artinya model sangat baik untuk dilakukan peramalan. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dinyatakan bahwa CAR pada BPRS akan mengalami peningkatan kinerja selama beberapa tahun kedepannya. Persamaan yang didapat pada hasil peramalan NPF di BPRS yang terdaftar di OJK pada periode tahun 2023 diperkirakan BPRS memiliki NPL sebesar 5,20%, tahun 2024 sebesar 4,14% dan pada tahun 2025 sebesar 2,93%. Nilai MAPE menurut hasil perhitungan pun diketahui sebesar 7,707% yang artinya nilai *error* pada perhitungan ini <10% semakin kecil nilai *error* maka semakin baik model untuk melakukan peramalan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurmala, peramalan dilakukan untuk periode tahun 2023 s.d 2025 dengan menggunakan variabel NPF, CAR dan ROA sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aset BPRS dengan menggunakan data tahun yang berbeda dengan penelitian diatas sehingga tujuannya adalah meramalkan aset BPRS tahun 2025 s.d 2027.

Peramalan sebagai alat bantu untuk memprediksi kemajuan dari kinerja perbankan salah satunya dengan metode *trend non linear*, alat bantu ini nantinya akan membantu perusahaan meramalkan kejadian di masa depan, seperti meramalkan nilai aset perusahaan selama beberapa tahun yang akan datang, selain memperhatikan aset, pembiayaan pada

suatu bank juga harus diperhatikan dan memerlukan pengelolaan pembiayaan yang baik karena nantinya akan menghasilkan keuntungan yang didapat oleh bank sehingga bertambahnya pula total aset yang akan didapat, dan diperlukan pengelolaan risiko pembiayaan yang baik karena akan menjaga aset dan menghindari terjadinya bank itu terlikuidasi serta mengalami kebangkrutan, maka dari itu aset harus diperhatikan dan dikelola dengan baik karena nantinya akan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan pemaparan diatas, dengan ini peneliti ingin berkontribusi dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Peramalan Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Metode Trend Non Linear”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan pada BPRS dari tahun 2012 s.d 2024 paling rendah hanya sebesar 4,43 s.d 18,9 triliun jika dibandingkan dengan BUS mencapai di angka 142,12 s.d 413,25 triliun dan UUS sebesar 42 s.d 211 triliun.
2. NPF pada BPRS di Indonesia mengalami kondisi fluktuasi penurunan.
3. Adanya persaingan bisnis mikro menengah yang semakin ketat diantara BUS, UUS dan BPRS.
4. Permasalahan banyaknya likuidasi pada bank BPRS, terjadi pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, BPRS Kota Juang Perseroda dan BPRS Saka Dana Mulia yang telah dicabut izin usahanya hingga mengalami kebangkrutan pada awal tahun 2024 karena pengelolaan aset yang tidak baik.

C. Batasan Masalah

Dari pengelompokkan identifikasi masalah, peneliti pun memberi batasan atas masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan supaya penelitian dapat lebih terarah dan terfokus sehingga meminimalisir terjadinya perluasan ke bahasan yang lain. Batasan masalah tersebut diantaranya:

1. Instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Penelitian hanya berfokus pada aset
3. Data tahun masa lalu yang digunakan dari mulai tahun 2012 s.d 2024
4. Metode yang digunakan dalam meramalkan aset BPRS yaitu *trend non linear* dengan jenis kuadratik
5. Tahun proyeksi yang diteliti pada tahun 2025 s.d 2027.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan yaitu Bagaimana cara meramalkan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia menggunakan metode *trend non linear*?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Peramalan Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode 2025 s.d 2027 dengan metode *trend Non linear*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di atas, maka diharapkan manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Proposal penelitian ini dapat bertujuan untuk menghasilkan wawasan baru tentang penggunaan metode tersebut dalam peramalan aset. Hal ini dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan metode lain yang relevan dengan perbankan syariah.

2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil prediksi yang dihasilkan. Rekomendasi ini dapat berupa strategi pengelolaan aset. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengelolaan yang lebih baik dan keberlanjutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Bagi Peneliti

- a. Membantu menerapkan informasi yang didapat di bangku perkuliahan dalam rangka membantu ketersediaan untuk memasuki dunia kerja.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat berguna dalam proses belajar untuk menganalisis aset perbankan syariah. Sekaligus juga dapat memberikan pengalaman meramal suatu instansi yang dengan begitu akan meningkatkan pemahaman tentang langkah meramal aset bank dengan metode *trend non linear*

- c. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk pembaca dan referensi untuk mahasiswa.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teoritis berisi tentang landasan teori dari hasil studi pustaka yang dikaji. Teori-teori yang diuraikan dapat menjadi acuan pendukung terkait masalah yang dibahas oleh peneliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hasil hipotesis yang dirumuskan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya berupa waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, Teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan mengenai ilustrasi secara global dari objek yang diteliti, cara pengujian dari hipotesis yang telah dibuat dan juga analisis dari data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai hasil kesimpulan yang telah diperoleh dari pengujian data sebelumnya dan saran-saran yang dapat membangun bagi peneliti selanjutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan Daftar Pustaka dan berbagai lampiran data.